

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pengukuran kerentanan wilayah terhadap bahaya kelaparan menggunakan indeks komposit dengan komponen *exposure*, *sensitivity*, dan *adaptive capacity*, diperoleh empat kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Indeks *Exposure* (Paparan)

Berdasarkan dimensi *exposure*, yang diukur melalui indikator prevalensi stunting ($TB/U < -2\ SD$), prevalensi gizi kurang ($BB/U < -2\ SD$), dan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan, diperoleh bahwa beberapa provinsi masih menghadapi paparan tinggi terhadap risiko kelaparan. Hasil perhitungan indeks *exposure* menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki nilai tertinggi. Kondisi ini mencerminkan tingginya jumlah balita yang mengalami stunting, gizi kurang, serta rumah tangga yang rawan pangan, sehingga risiko terhadap gangguan pangan lebih besar dibandingkan provinsi lain.

2. Indeks *Sensitivity* (Sensitivitas)

Dimensi *sensitivity* dianalisis menggunakan indikator persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi tidak layak. Hasil perhitungan indeks *sensitivity* menunjukkan bahwa beberapa provinsi, terutama NTT, Papua Barat Daya, dan Papua, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi terhadap gangguan pangan. Tingginya persentase kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya akses sanitasi yang layak membuat masyarakat di wilayah tersebut lebih rentan terhadap dampak negatif jika terjadi kekurangan pangan atau krisis gizi.

3. Indeks *Adaptive capacity* (Kapasitas Adaptif)

Untuk dimensi *adaptive capacity*, indikator yang digunakan meliputi rasio pemanfaatan jaminan kesehatan (BPJS), rasio alokasi anggaran kesehatan dekonsentrasi per penduduk, rata-rata lama sekolah, dan rasio Rasio jumlah pasar per 100 ribu penduduk. Hasil indeks *Adaptive capacity* menunjukkan

bahwa provinsi dengan kapasitas adaptif terendah adalah Banten, NTB, dan Kalimantan Barat, yang menandakan keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk merespons, mengatasi, dan menyesuaikan diri terhadap ancaman kelaparan. Rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan, keterbatasan anggaran kesehatan, rendahnya pendidikan, serta Rasio jumlah pasar per 100 ribu penduduk yang sedikit menjadi faktor pembatas kapasitas adaptif wilayah.

4. Indeks Kerentanan Wilayah terhadap Bahaya Kelaparan

Penggabungan indeks *exposure*, indeks *sensitivity*, dan indeks *Adaptive capacity* menghasilkan indeks kerentanan wilayah terhadap bahaya kelaparan. Provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi adalah NTT, Maluku, NTB, dan Papua, menunjukkan bahwa kombinasi *exposure* tinggi, *sensitivity* tinggi, dan *Adaptive capacity* rendah membuat wilayah-wilayah tersebut sangat rentan terhadap kelaparan. Sebaliknya, Bali memiliki indeks kerentanan terendah, karena paparan rendah, kepekaan sosial-ekonomi lebih stabil, dan kapasitas adaptif yang memadai, sehingga mampu mengurangi risiko kelaparan lebih efektif.

5.2. Saran

5.2.1. Aspek Teoritis

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel atau komponen kerentanan yang lebih beragam, seperti aspek lingkungan, sosial-budaya, maupun kapasitas kelembagaan daerah, sehingga analisis kerentanan terhadap bahaya kelaparan menjadi lebih menyeluruh.
2. Penelitian ini menganalisis kerentanan kelaparan pada 35 provinsi pada tahun 2024 sehingga cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat berfokus pada satu atau beberapa provinsi saja agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam dan hasilnya lebih spesifik untuk kebutuhan kebijakan lokal.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan menggunakan metode penelitian yang berbeda guna mengeksplorasi perspektif baru yang dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

5.2.2. Aspek Praktis

Kondisi kerentanan wilayah terhadap bahaya kelaparan di berbagai provinsi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, akses pangan, dan kapasitas adaptif wilayah. Hasil penelitian menunjukkan adanya provinsi dengan kerentanan tinggi seperti NTT, Maluku, NTB, dan Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses pangan, perbaikan layanan gizi, serta penguatan kapasitas adaptif masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pertanian dan infrastruktur pendukung pangan sebagai strategi utama dalam menurunkan risiko kelaparan. Selain itu, masyarakat diharapkan mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas gizi keluarga sehingga ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.